



Warga Miskin Turun 0,35 Persen

GOTONG ROYONG - Warga Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang bergotong royong bersih-bersih di tepian Sungai Landak, Sabtu kemarin. Gotong royong Dusun Pulau Bendu melibatkan anggota KSM Kotaku, PKK Desa, Karang Taruna, dan warga sekitar.



PIAGAM - Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa menerima piagam dari Kepala BPS Landak Yanuar Lestariadi, kemarin.

Pemkab Perbaiki 1.090 Rumah BRS

LANDAK, TRIBUN - Jumlah warga atau penduduk miskin di Kabupaten Landak menurun hingga Desember 2020. Hal itu diungkap Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Landak. Dibandingkan tahun 2019, jumlah penduduk miskin turun 0,35 persen, dari 11,47 persen menjadi 11,12 persen. Menurunnya angka kemiskinan ini dikutip dari berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Landak melalui Profil Kemiskinan

Kabupaten Landak 2020 No 01/12/6103/Th.VIII pada 15 Desember 2020. Dalam berita resmi tersebut, dicantumkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Landak sebesar 42,36 ribu jiwa (11,12 persen), mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 11,47 persen.

Sedangkan garis kemiskinan di Kabupaten Landak Tahun 2020 sebesar Rp 385.314, mengalami kenaikan 2,99 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp 374.117.

Kemudian untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Landak tahun 2020 sebesar 1,54 mengalami penurunan 0,17 dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,71.

Menanggapi data tersebut, Bupati Landak Karolin Margret Natasa memaparkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2019-2020, Kabupaten Landak masih berada peringkat 13 setelah Kabupaten Ketapang. "Kita di Kabupaten Lan-



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2020	Hal.: 11																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Kita di Kabupaten Landak pada Tahun 2020 menempati peringkat 13 setelah Kabupaten Ketapang.

dr Karolin Margret Natasa
Bupati Landak

dak pada Tahun 2020 menempati peringkat 13 setelah Kabupaten Ketapang. Sedangkan urutan pertama yakni Kabupaten Kubu Raya. Tetapi setiap tahun perubahan persentase penduduk miskin selalu mengalami penurunan,” ujar Bupati Landak, Minggu (20/12)

Saat dikonfirmasi terkait data resmi ini, Kepala BPS Kabupaten Landak Yanuar Lestariadi mengatakan bahwa garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

“Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan,” jelas Yanuar.

Program BRS

Sebelumnya, 1.090 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Landak mendapat bantuan program Bantu-

an Rumah Swadaya (BRS) yang saat ini pengerjaannya telah rampung dilaksanakan.

“Untuk tahun 2020 ini, kita mendapat alokasi BRS untuk perbaikan 1.090 unit rumah tersebar di seluruh kecamatan di Landak. Karena prosesnya sudah selesai, hari ini kita melakukan penyerahan kunci secara simbolis dengan pengguntingan pita dan dilanjutkan dengan pemasangan peneng di bagian depan rumah salah satu rumah warga penerima manfaat,” kata Bupati Karolin.

Simbolis penyerahan kunci tersebut sekaligus menandakan program BRS yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020 berakhir.

“Kita patut bersyukur, karena program bantuan rumah swadaya di Kabupaten Landak masih bisa terlaksana, meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi banyak kendala, seperti kondisi cuaca dan medan yang berat dalam pendistribusian material, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian kita,” tuturnya.

Dia menjelaskan, program bantuan rumah swadaya ini bertujuan untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Landak. Program ini bersifat sebagai stimulan atau pengungkit masyarakat dengan sumber utama pendanaan tetap ada pada penerima manfaat atau swadaya dari masyarakat.

Sementara, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak Jamelius menjelaskan pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya Sumber Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2020 dan target selesai pada bulan Desember 2020, yang diawali dengan verifikasi penerima manfaat pada Maret 2020.

“Sebelumnya, kami selaku pelaksana kegiatan ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati Landak yang sudah memberikan kebijakan anggaran untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dengan penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020,” ujar Jamelius.

Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Sumber Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp3.762.500.000, dengan rincian pembangunan baru sebanyak 51. (alf)